

KURIKULUM MERDEKA DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN PENDIDIKAN PAULO FREIRE

Madhakomala, Layli Aisyah, Fathiyah Nur Rizqiqa, Fransiska Desiana Putri, Sidiq Nulhaq

Pendidikan Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

aisyah.layli@gmail.com

Abstract

Education itself has the essence of fulfilling the basic needs of human life and becoming a human means to carry out the life of the world in the context of the process of maintaining the necessities of life. Education aims in order to survive as a crystallization of values that are embodied in both the dimensions of psychological, sociological, social and cultural values. Studying an educational science must be related to ontological, epistemological, and axiological. The article aims to present a discussion on the study of educational thinking according to Paulo Freire and its implementation in the independent learning curriculum so that readers can get much more knowledge improvement that can be implemented also in their respective education where independent learning will be intensified by the Minister of Education as a new curriculum that begins practiced in the world of education in Indonesia. The presence of the Independent Learning curriculum, which is currently still in the experimental stage, has similarities with the educational concept proposed by Paulo that education must feel freedom both from freedom of thought and to voice opinions. The independent learning curriculum gives freedom to students in their learning activities, students are free to express their opinions, conduct discussions both with students and with the teacher. This activity is the same as that carried out by Paulo Freire in liberation education, students free themselves to express their opinions.

Keywords: Kurikulum Merdeka, Educational Thought of Paulo Freire, Liberation Education

Abstrak

Pendidikan itu sendiri pada hakekatnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia dan menjadi sarana manusia untuk menyelenggarakan kehidupan dunia dalam rangka proses pemeliharaan kebutuhan hidup. Pendidikan bertujuan agar tetap bertahan sebagai kristalisasi nilai-nilai yang diwujudkan baik dalam dimensi nilai psikologis, sosiologis, sosial dan budaya. Mempelajari suatu ilmu pendidikan harus berkaitan dengan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan pembahasan kajian pemikiran pendidikan menurut Paulo Freire dan implementasinya dalam kurikulum pembelajaran mandiri agar pembaca dapat memperoleh lebih banyak peningkatan pengetahuan yang dapat diterapkan juga di pendidikan masing-masing dimana pembelajaran mandiri akan diintensifkan dengan Menteri Pendidikan sebagai kurikulum baru yang mulai dipraktikkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kehadiran kurikulum Pembelajaran Mandiri yang saat ini masih dalam tahap eksperimen memiliki kesamaan dengan konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Paulo bahwa pendidikan harus merasakan kebebasan baik dari kebebasan berpikir maupun mengeluarkan pendapat. Kurikulum pembelajaran mandiri memberikan kebebasan kepada siswa dalam kegiatan belajarnya, siswa bebas mengemukakan pendapat, melakukan diskusi baik dengan siswa maupun dengan guru. Kegiatan ini sama seperti yang dilakukan oleh Paulo Freire dalam pendidikan pembebasan, siswa membebaskan diri untuk mengemukakan pendapatnya

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Pemikiran Paulo Freire, Pembebasan Pendidikan

PENDAHULUAN

Paulo Freire merupakan seorang tokoh pendidikan dan teoritikus pendidikan yang berasal dari Brazil. Ia memiliki konsep pendidikan kebebasan dimana ia merasa bahwa konsep pendidikan kebebasan relevan dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat itu, dimana konsep pendidikan yang diterapkan pada saat itu dinilai sebagai pendukung dari adanya tindakan penindasan, sehingga Paulo menciptakan konsep pemikiran pendidikannya sendiri dimana yang menjadi aspek utamanya adalah kebebasan untuk berpendapat disertai dengan adanya kesadaran serta penyadaran dalam pendidikan agar dapat membentuk manusia yang seutuhnya.

Menurut Paulo Freire yang mempunyai pemikiran mengenai pendidikan berawal dari kondisi ketertindasan yang terjadi di Brazil pada masanya. Pada kondisi tersebut, terdapat suatu budaya yang disebut juga dengan Freire, yaitu “kebudayaan bisu”. Hal ini dilakukan oleh para penguasa yang bertujuan untuk membodohi masyarakat serta digunakan sebagai sarana penindasan. Freire yang melihat kondisi seperti itu, akhirnya memutuskan untuk bangkit beserta dengan pemikirannya mengenai pendidikan yang tujuannya untuk memerdekakan manusia, bukan untuk melakukan penindasan.

Sektor pendidikan sebetulnya selalu menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan pemerintah terus mengeluarkan kebijakan untuk bidang pendidikan, di antaranya adalah kebijakan mengenai program wajib belajar, selanjutnya ada beasiswa yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, beberapa program pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta adanya anggaran APBN sebesar 20% khusus untuk bidang pendidikan. Namun tidak hanya beberapa kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan salah satunya dilihat dari kurikulum yang diterapkan di Indonesia yaitu pada Kurikulum Merdeka.

Kurikulum merdeka yang mulai diuji coba pada tahun 2020 dan akan mulai diterapkan pada tahun 2022. Kurikulum Merdeka ini pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Makarim pada 2019, hal ini dilatarbelakangi dari hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan hasil penilaian peserta didik yang ada di Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah, sehingga dengan hasil penelitian ini mendikbud mencetuskan konsep kurikulum yang baru. Kurikulum merdeka memiliki konsep kemandirian dan kemerdekaan bagi pendidikan yang ada di Indonesia untuk menentukan sendiri cara atau metode terbaik yang dapat digunakan selama proses belajar mengajar. (Afida, 2021)

Pada konsep kurikulum merdeka ini memiliki kesamaan dengan konsep pemikiran pendidikan kebebasan oleh Paulo Freire, hal ini dapat dilihat dari persamaan tujuan yaitu humanisasi yang dilakukan untuk memberikan kebebasan berpendapat dan berpikir dalam proses belajar dimana pada titik ini pendidikan harus mampu membawa manusia pada kemerdekaan lahir dan batin.

Artikel ini bertujuan agar pembaca yang membaca dapat mengetahui dan memahami Kajian Pemikiran Pendidikan Menurut Paulo Freire dan implementasinya pada

Kurikulum Merdeka Belajar. Oleh karena itu diperlukannya menggali sumber-sumber yang telah ditemukan sebelumnya kemudian diulas kembali sehingga terwujudlah artikel ini untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode analisis literature (library research) yakni penelaahan berbagai sumber ilmiah seperti artikel jurnal baik Nasional dan Internasional serta buku yang sesuai dengan tema dan judul yang dibahas. Metode analisis literatur membuat penulis untuk membaca dan mencari sumber bahan bacaan yang sesuai dengan tema yang dibahas atau relevan. Dalam hal ini metode analisis literatur merupakan sebuah langkah yang tepat dan efektif.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kurikulum

Kurikulum diartikan secara etimologis, berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *curir* yang berarti pelari dan *curare* yang diartikan sebagai tempat berpacu. Selain itu, istilah kurikulum ternyata berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, di mana dapat diartikan sebagai jarak. Jarak di sini memiliki makna dengan adanya jarak tersebut harus ditempuh oleh seorang pelari yang berawal dari *start* sampai *finish* (Bahri, 2017)

Beberapa pakar menjabarkan pandangannya berdasarkan pengertian kurikulum, yaitu berdasarkan pandangan S.Nasution merupakan sebuah rancangan yang telah disusun dengan tujuan melancarkan dalam kegiatan proses pembelajaran dimana menjadi tanggung jawab dari pihak pembimbing baik sekolah atau Lembaga pendidikan. Nasution mengatakan bahwa tidak hanya rencana yang menjadi fokus dalam kurikulum, namun sebuah proses yang terjadi didalamnya.

Crow and Crow Kembali menjelaskan secara rinci apa saja yang terdapat di kurikulum, bahwasanya ia mengatakan kurikulum memuat isi dan materi pelajaran yang kelak akan ditempuh oleh peserta didik, dengan adanya kurikulum peserta didik dapat segera menyelesaikan program pendidikannya hingga mendapatkan ijazah. (Abdullah)

Namun berbeda pengertian kurikulum berdasarkan fungsinya, Muhaimin dan Abdul Mujib menjelaskan bahwa kurikulum berdasarkan fungsi terdiri dari tujuh pengertian, diantaranya:

Pertama, kurikulum berfungsi sebagai program studi, merupakan alat mata pelajaran yang akan dipelajari peserta didik di Lembaga pendidikannya. *Kedua*, kurikulum dapat berfungsi sebagai konten merupakan sebuah informasi yang terlihat pada buku-buku di dalam kelas, namun data tersebut tidak dilengkapi dengan informasi lainnya sehingga tidak menimbulkan belajar. *Ketiga*, kurikulum berfungsi sebagai kegiatan yang berencana, yaitu kegiatan yang sudah direncanakan dan berusaha memberikan hasil yang terbaik. *Keempat*, kurikulum berfungsi sebagai hasil belajar merupakan suatu alat untuk memperoleh hasil dari pembelajaran tanpa mendeskripsikan proses yang dilaluinya. *Kelima*, kurikulum sebagai reproduksi kultural merupakan implementasi yang terjadi di

generasi muda yang terjadi pada masyarakat. *Keenam*, kurikulum sebagai pengalaman belajar merupakan bentuk hasil yang diperoleh dari seluruh kegiatan proses belajar yang pernah dilalui. *Ketujuh* atau terakhir, kurikulum adalah alat yang digunakan bersama dalam dunia pendidikan untuk mencapai hasil yang kita inginkan dan menghasilkan sebuah produksi yang dapat dimanfaatkan bersama. (Bahri, 2017)

Kurikulum dijadikan sebagai posisi strategis yang berada secara umum yang terdiri dari visi, misi, tujuan, dan pedoman dari pendidikan tersebut. Sifat kurikulum yang dinamis sehingga akan mengalami perubahan secara fleksibel dan futuristic. Konsep kurikulum terdiri atas tiga konsep, yaitu substansi, sistem, serta bidang studi.

Konsep pertama pada kurikulum adalah sebagai substansi merupakan sebuah proses belajar yang telah direncanakan sehingga di dalam proses tersebut terdapat substansi-substansi yang terdiri dari tujuan, bahan ajar, jadwal belajar, bentuk evaluasi, dan dokumen yang berisi tanda persetujuan antara penyusun kurikulum dengan masyarakat, serta pemegang kebijakan pendidikan dengan masyarakat.

Konsep kedua, yaitu konsep di mana kurikulum berperan sebagai sistem merupakan sistem persekolahan yang terdiri dari sistem mengenai sekolah, pendidikan dan masyarakat. Sistem kurikulum menjadikan kurikulum tersebut menjadi dinamis. Konsep ketiga, yaitu konsep di mana kurikulum berperan sebagai bidang studi, artinya kurikulum dapat menjadi bidang ahli suatu kajian atau ahli pendidikan yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai kurikulum serta sistem kurikulum yang berlaku. (Fujiawati, 2016)

B. Kurikulum Merdeka

Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat dengan BSNP, kurikulum merdeka belajar merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBURISTEK) diberikan kepada satuan pendidikan sebagai langkah tambahan digunakan dalam rangka pemulihan pembelajaran pada waktu tahun 2022-2024.

Kurikulum merdeka belajar merupakan kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Kurikulum yang diluncurkan *Kemendikburistek* Bapak *Nadiem Makarim* adalah upaya bentuk evaluasi dari perbaikan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 digunakan sebelum masa pandemi melanda Indonesia, dimana kurikulum 2013 merupakan kurikulum satu-satunya yang digunakan didalam proses belajar mengajar.

Awal mula pencetusan kurikulum merdeka belajar merujuk pada kondisi pandemic Covid-19 sehingga menyebabkan berbagai kendala dalam proses pembelajaran. Kurikulum 2013 yang selama ini digunakan dalam proses pembelajaran kemudian disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang difungsikan sebagai memudahkan satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran.

Hadirnya kurikulum merdeka belajar yang sekarang lagi proses pemulaian percobaan, walaupun demikian tetap pada kurikulum 2013 dan kurikulum darurat juga masih dapat digunakan pada satuan pendidikan. Hingga pada akhirnya nanti pada tahun

2024 akan diadakan evaluasi penentuan kebijakan kurikulum yang terbaru dan menjadi acuan juga untuk *Kemendikburistek* dalam menentukan kebijakan lanjutan pasca pemulihan pembelajaran.

Berikut ini dijabarkan perbedaan yang diperoleh pada Kurikulum Merdeka Belajar dengan Kurikulum sebelumnya yang berlaku pada jenjang SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi :

1) Jenjang SD

Pada kurikulum merdeka belajar, penerapannya pada penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi satu yaitu “Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial) dan menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggris yang awalnya berupa mata pelajaran pokok menjadi mata pelajaran pilihan.

2) Jenjang SMP

Pada kurikulum merdeka belajar, penerapan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang awalnya berupa mata pelajaran pilihan, maka menjadi mata pelajaran wajib yang harus dimiliki oleh semua jenjang SMP.

3) Jenjang SMA/SMK

Pada kurikulum merdeka belajar, tidak ada lagi peminatan seperti IPA, IPS, atau Bahasa. Lalu di jenjang SMK model pembelajaran yang didesain lebih sederhana berupa 70% mata pelajaran kejuruan dan sisanya mata pelajaran umum. Tidak hanya itu pada jenjang SMA/SMK masa pendidikan siswa dituntut untuk dapat menghasilkan produk berupa esai ilmiah seperti halnya mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Hal itu diperuntukkan untuk para siswa agar mampu berpikir kritis, ilmiah dan analitis.

4) Perguruan Tinggi

Pada kurikulum merdeka belajar, mahasiswa diberikan kesempatan terbuka untuk mempelajari banyak hal sesuai dengan minatnya tanpa terbatas oleh program studi yang ditempuh. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa cara seperti magang, pertukaran mahasiswa, penelitian, wirausaha, KKN atau proyek-proyek independent.

Program Merdeka Belajar mempunyai empat kebijakan yang berlaku, di antaranya: Ujian Standar Berbasis Nasional (USBN), kebijakan tentang Ujian Nasional, perubahan kebijakan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta peraturan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. Keempat kebijakan tersebut Kembali diuraikan dibawah ini, yaitu yang *pertama* USBN tahun 2020. Berdasarkan Permendikbud No. 43 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ujian. Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa “Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran”. Lalu ditambahkan pada pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan berupa “bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berupa portfolio, penugasan, tes tertulis, dan bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan”. Hingga pada akhirnya ditegaskan pada pasal 6 ayat 2 yang menjelaskan “Untuk kelulusan peserta didik ditetapkan oleh

satuan pendidikan/program pendidikan yang bersangkutan”. Berdasarkan kebijakan tersebut menyatakan bahwa guru dan sekolah mempunyai kebebasan merdeka dalam menilai hasil belajar siswa (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2013).

Kedua, Ujian Nasional yang tahun-tahun sebelumnya setiap akhir masa jenjang sekolah akan dilalui oleh para siswa, namun Ujian Nasional terakhir dilaksanakan adalah pada tahun 2020. Oleh karena itu, pada tahun 2021 istilah UN diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang ditunjukkan untuk mengukur kemampuan siswa dalam bidang literasi dan Bahasa. Sistem AKM ini memiliki perbedaan dengan UN, jika Ujian Nasional dilaksanakan untuk siswa pada tingkat akhir, maka AKM hanya dilaksanakan untuk siswa kelas 4, 8, dan 11. Tujuannya untuk mendorong guru dan sekolah dapat menempatkan kondisi setiap siswa agar guru dan sekolah dapat memperbaiki kualitas pembelajaran.

Ketiga, penyusunan mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Surat Edaran Mendikbud no 14 tahun 2019, yaitu mengenai RPP yang disederhanakan, tujuannya untuk memberikan kebebasan kepada guru dalam menyusun proses pembelajaran, jadi guru dapat memilih, menggunakan, menembangkan RPP yang sudah disediakan terlebih dahulu. Guru diberikan kebebasan karena tergantung kebutuhan siswa masing-masing, dimana kebutuhan siswa antar orang dan sekolah pastinya berbeda. Penyederhanaan RPP diharapkan agar guru lebih bebas dalam Menyusun RPP sehingga dapat jauh lebih interaksi secara aktif, dinamis dan tidak kaku.

Ketiga, PPDB Zonasi yang pada saat pelaksanaannya sudah fleksibel, sehingga dapat membantu dalam mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas sekolah di berbagai daerah. Daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan wilayah zonasinya, yang terpenting tidak adanya diskriminasi bagi anggota masyarakat untuk dapat bersekolah di sekolah terbaik.

Jika disandingkan oleh pemikiran pendidikan yang sama-sama memiliki konsep Pendidikan Pembebasan, maka akan cocok oleh pemikiran pendidikan yang dikemukakan oleh Paulo Freire. Kurikulum merdeka dapat membentuk setiap peserta didik agar mampu mengatasi setiap kondisi masalah sosial yang terjadi dan mengubahnya menjadi lebih baik. Maka pada sub-bab selanjutnya akan membahas bagaimana konsep Pendidikan Pembebasan yang dikemukakan oleh Paulo Freire dan keterkaitannya pada Kurikulum Merdeka.

C. Pendidikan Pembebasan Menurut Paulo Freire

Paulo Freire dilahirkan di Recife, Brazil (bagian timur) pada 19 september 1921 dan wafat pada 2 May 1977 de São Paulo, Brazil. Paulo adalah seorang tokoh pendidikan dan teoritikus pendidikan Brazil yang berpengaruh di dunia. Saat dewasa Paulo bekerja sebagai Direktur di bagian Pendidikan dan Kebudayaan SESI (pelayanan sosial) tepatnya di negara bagian Pernambuco pada tahun 1946 – 1954 dari pekerjaannya ini membuat Paulo berkontak langsung dengan kaum miskin di kota – kota. Dari pengalamannya tersebut bermanfaat sebagai bahan penelitian metode dialogis dalam pendidikan pada tahun 1961. Selama masa jabatannya Paulo melaksanakan sebuah program dimana

program tersebut memiliki tujuan untuk memberantas buta huruf yang dialami ribuan petani miskin di timur laut. Metode ini dikenal dengan nama “Metode Paulo Freire”.

Selama bekerja sebagai direktur di bagian pendidik dan kebudayaan (SESI), Paulo menjadi semakin memahami tentang dunia pendidikan terutama pendidikan yang saat itu berlangsung di negaranya. Pada saat itu pendidik yang berlangsung di negaranya dapat dikatakan sebagai pendidikan yang buruk dikarenakan hanya beberapa pihak-pihak tertentu saja yang mendapatkan keuntungan dari pendidikan, yaitu hanya berlaku untuk masyarakat yang memiliki status sosial tinggi saja. Dikarenakan rasa tidak sukanya pada konsep pendidikan yang ada saat itu, Paulo mengeluarkan beberapa gagasannya mengenai konsep pendidikan, salah satunya adalah Konsep Pendidikan Pembebasan, dimana konsep ini dikeluarkan sebagai solusi dari kritikan yang disampaikan untuk sistem pendidikan yang ada saat itu “Pendidikan Gaya Bank”.

Pada pendidikan gaya bank ini Paulo mengatakan bahwa peserta didik hanya dianggap sebagai sebuah bejana-bejana atau sebuah wadah kosong yang nantinya akan diisi oleh seorang guru dengan diberikan materi yang hanya bersumber dari guru tersebut saja, dengan anggapan semakin penuh wadah - wadah atau bejana tersebut maka semakin baik pula murid dan guru tersebut. Sehingga pada pendidikan ini guru bisa dianggap juga sebagai subjek yang bercerita dan murid sebagai subjek yang mendengarkan kemudian menghafalkan secara berulang sehingga komunikasi yang terbangun hanya satu arah saja, menjadi kurang komunikasi tersebut tidak efisien.

Dalam pendidikan gaya bank juga pendidik atau guru dianggap menjadi sosok yang sentral dimana hal yang dikatakan dan dilakukan olehnya harus selalu diikuti oleh murid, dengan adanya anggapan seperti itu dapat membuat matinya daya berpikir kritis dan kreatif yang dimiliki murid, hal ini juga dapat mengurangi keterlibatan murid dalam proses pembelajaran sehingga murid menjadi malas berpikir.

Pada konsep pendidikan pembebasan yang dikemukakan oleh Paulo memiliki penafsiran bahwa pendidikan yang ada harusnya dapat membuat pelajar atau peserta didiknya merasakan kebebasan baik kebebasan berpikir terutama kebebasan untuk bersuara untuk mengeluarkan pendapatnya. Paulo juga mengemukakan menurut penafsirannya bahwa tujuan utama dari sebuah pendidikan adalah untuk membuka mata para peserta didiknya guna menyadari realitas ketertindasan yang ada kemudian bertindak melakukan transformasi realistik.

Konsep pendidikan pembebasan ini lahir sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh Paulo agar para kaum tertindas di negaranya dapat membebaskan diri dari kebelengguan yang mereka rasakan. Menurut Paulo pada konsep pendidikan yang ada di negaranya saat itu lebih mengarah kepada konsep pendidikan yang membungkam para peserta didiknya, bahkan Paulo menyebutkan situasi yang tercipta saat itu sebagai “Kebudayaan Bisu”.

Pada konsep kebudayaan bisu Paulo menyebutnya sebagai ketidaksadaran (*historical anesthesia*) yang dimana saat itu masyarakat memiliki rasa tidak peduli dengan hal yang sedang terjadi serta tidak ingin ikut berpartisipasi untuk melakukan perubahan, sedangkan menurut Paulo pendidikan dapat dikatakan sebagai jalur permanen

dari adanya kebebasan, dimana didalamnya terdapat dua tahapan. Tahap pertama, pendidikan dapat membuat seseorang menyadari bahwa penindasan yang diterimanya serta dengan adanya sebuah gerakan praktis dapat membuat keadaan mereka berubah pada saat itu. Kedua, pendidikan dikatakan sebagai suatu proses permanen terhadap aksi budaya tentang pembebasan.

Dalam buku *Education as the Practice of Freedom in Education for Critical Consciousness*, Paulo mengemukakan bahwa pendidikan harus menjadi sebuah sarana dalam proses pemerdekaan (humanisasi), bukan sebuah penjinakan (domestikasi) sosial yang seringkali terjadi di dalam dunia ketiga (negaranya), dimana pendidikan digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kehendak penguasa kepada masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan, maka dengan itu pendidikan harus dianggap sebagai aksi dan refleksi untuk mengubah realitas, penindasan menuju kebebasan.

D. Keterkaitan Kurikulum Merdeka dengan Pendidikan Pembebasan Paulo Freire

Pada dasarnya kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang dimana proses pembelajarannya bersifat otonom dan fleksibel sehingga menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak menurut aturan, jadi kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Paulo mengenai pendidikan pembebasan yang memberikan kesempatan peserta didiknya untuk dapat merasakan kebebasan baik kebebasan berpikir terutama kebebasan untuk bersuara untuk mengeluarkan pendapatnya. Peserta didik diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan pembelajaran, baik dalam berpikir maupun berpendapat. Namun, meskipun peserta didik dibebaskan untuk mengutarakan pendapatnya, peserta didik diminta untuk tetap memenuhi kaidah yang ada, seperti menggunakan pemilihan kata yang tidak memicu konflik SARA. Hal ini dikarenakan dalam kurikulum merdeka belajar para peserta didik tetap diberikan penguatan mengenai pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang bermoral dan berakhlak mulia. Begitu pula mengenai pendidikan pembebasan menurut Paulo dimana pada saat itu kebebasan bersuara ini dimaksudkan sebagai sebuah alat untuk terbebas dari penindasan yang harus ada proses pemerdekaan atau humanisasi, maka kegiatan pembelajaran harus tetap mengedepankan moral.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Nadiem Makarim selaku menteri pendidikan yang mengusulkan kurikulum merdeka belajar ini, pembelajaran yang semula hanya dilaksanakan di dalam kelas akan mengalami perubahan. Kegiatan pembelajaran akan dapat dilaksanakan di luar kelas, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak hanya menggunakan metode *Teacher centered* saja namun murid dapat berdiskusi lebih dengan guru baik mengenai topik pembelajaran maupun mengenai ide/gagasan lain yang dapat mengasah pemikiran kritis para peserta didik dan kegiatan ini pula dapat membentuk karakter peserta didik yang bersifat mandiri, beradab, memiliki sopan santun, mampu berkompetisi dan peserta didik tidak hanya mengandalkan sistem ranking di kelas saja. Kurikulum merdeka belajar ini bila disandingkan dengan konsep pendidikan pembebasan yang dikemukakan Paulo dapat menjadi salah satu alternatif untuk

mewujudkan tujuan konsep pendidikan pembebasan Paulo. Konsep pendidikan pembebasan yang pada masa itu dibentuk oleh Paulo sebagai suatu cara agar “Kebudayaan Bisu” yang membungkam para peserta didik dapat terhapuskan sehingga peserta didik dapat membebaskan diri untuk menyatakan pendapatnya. Tentu hal tersebut sesuai dengan proses pembelajaran yang berlaku pada kurikulum merdeka belajar yang membebaskan para peserta didik untuk menyampaikan ide /gagasan /pendapatnya.

Sebaliknya jika konsep pendidikan pembebasan ini diaplikasikan di masa sekarang yang dimana melalui kurikulum merdeka ini pemerintah bertujuan untuk menghapuskan sistem ranking, karena sistem ranking yang semula dianggap sebagai tolok ukur kecerdasan siswa ini sangat sesuai jika digambarkan sebagai “Kebudayaan Bisu” yang dimaksud oleh Paulo. Tidak sedikit orang tua dan guru yang benar-benar mengukur tingkat kecerdasan peserta didik dari ranking yang didapatkan. Melalui dihapuskannya sistem ranking yang membungkam siswa untuk berkreasi, kurikulum merdeka belajar ini dapat diibaratkan sebagai sebuah konsep pendidikan pembebasan yang dikatakan Paulo

Di dalam bukunya yang berjudul “*Education as the Practice of Freedom in Education for Critical Consciousness*”, Paulo memberikan pesan bahwa pendidikan harus dianggap sebagai aksi dan refleksi untuk mengubah realitas, penindasan menuju kebebasan. Refleksi untuk mengubah realitas ini juga dapat diwujudkan melalui Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, hal ini dilakukan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang keilmuan yang berguna di dunia kerja dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam dunia usaha dan kerja. Mahasiswa akan diberikan kebebasan dalam memilih beban belajar (SKS) yang berada di luar program studi, baik dalam satu perguruan tinggi (PT), di luar PT, ataupun non-PT. Jadi, mahasiswa akan dibekali fasilitas dengan tujuan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan yang akan berguna ketika mahasiswa masuk dalam dunia kerja. Kaitannya dengan refleksi untuk mengubah realitas yang dikatakan Paulo, mahasiswa yang dikenalkan oleh dunia kerja lebih awal, akan menghasilkan akademisi yang kompeten sehingga dapat menjadi pilar untuk mengawali perubahan realitas yang terjadi di masyarakat.

Penindasan menuju kebebasan yang juga dikatakan Paulo dalam bukunya tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pendidikan, karena pendidikan akan membuat sadar akan penindasan yang diterimanya. Hal ini terjadi karena melalui pendidikan, seseorang dapat dilatih untuk berpikir kritis mengenai persoalan-persoalan tertentu dan hal ini pula lah yang ditekankan oleh kurikulum merdeka belajar bahwa pengajar dan mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, memiliki sikap yang inovatif, mampu berkomunikasi dengan baik, serta kolaboratif adalah bagian yang paling penting untuk dapat mencapai proses yang optimal.

KESIMPULAN

Kurikulum 2013 yang selama ini digunakan dalam proses pembelajaran kemudian disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang difungsikan sebagai memudahkan satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran. Hadirnya kurikulum merdeka belajar yang sekarang lagi proses pemulaian percobaan, walaupun demikian tetap pada kurikulum 2013 dan kurikulum darurat masih dapat digunakan pada satuan pendidikan. Salah satu tokoh pendidikan ternama yaitu Paulo merupakan tokoh pendidikan dan teoritikus pendidikan Brazil yang berpengaruh di dunia. Salah satu konsep pendidikan yang dikemukakan olehnya adalah pendidikan pembebasan. Pada konsep pendidikan pembebasan yang dikemukakan oleh Paulo memiliki penafsiran bahwa pendidikan yang ada harusnya dapat membuat pelajar atau peserta didiknya merasakan kebebasan baik kebebasan berpikir terutama kebebasan untuk bersuara untuk mengeluarkan pendapatnya. Konsep pendidikan ini hadir sebagai sebuah kritik terhadap kebudayaan yang ada pada saat itu yaitu, kebudayaan bisu. Berdasarkan pendidikan pembebasan yang dipaparkan olehnya, memiliki kesamaan pada kurikulum merdeka belajar yang sedang kita mulai rintis saat ini yaitu sama-sama memberikan kebebasan kepada peserta didiknya dalam kegiatan pembelajarannya. Kurikulum merdeka belajar memberikan kebebasan kepada peserta didiknya dalam kegiatan belajarnya, peserta didik bebas untuk mengemukakan pendapatnya, melakukan diskusi baik dengan peserta didik maupun dengan pengajarnya. Kegiatan ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh Paulo Freire dalam pendidikan pembebasan, peserta didik membebaskan dirinya untuk menyatakan pendapatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (n.d.). *Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah (Suatu Tinjauan Kritis Filosofis)*.
- Afida, I., Diana, E., & Agus Puspita, D. M. . (2021). Merdeka Belajar dan Pendidikan Kritis Paulo Friere dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman*, 12(02), 45–61. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i02.553>
- Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.61>
- Freire, P. (2001). *Paulo Freire - Pendidikan yang Membebaskan.pdf* (p. 124).
- Fujiawati, F. S. (2016). Pemahaman Konsep Kurikulum Dan Pembelajaran Dengan Peta Konsep Bagi Mahasiswa Pendidikan Seni. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni*, 1(1), 16–28.
- Idris, muh. (2009). Pendidikan Pembebasan : Telaah Terhadap Pemikiran Paulo Freire. *Dinamika Ilmu*, 9(2), 1–17.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional. *Lembaran Negara RI*, 53(9), 1689–1699.
- Muhajir, Oktaviyanthi, R., Lida, U. M., Nasikhin, Muflihin, A., Syadzili, M. F. R., Nitasari, N., Zukana, S., Hariadi, Babang, V. M. M. F., Romadhon, S., Juwariyah, I., Ande, A., Bangun, S. Y., Maimunah, I., Martiningsih, D., Babang, M. P. I., Widanita, N., Nurdinah, ... Kukuluh, N. (2021). Implementasi dan Problematika Merdeka Belajar. In *Angewandte Chemie International Edition* (Vol. 6, Issue 11).
- Murti, S., & Heryanto. (2020). Pro dan Kontra Kebijakan Merdeka Belajar Lukman. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* [Htpps://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP](https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP), 6(3), 295–307. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4302861>
- Nuryatno, M. A. (2015). Critical Remarks on Educational Philosophy of Paulo Freire. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.1542>
- Robikhah, A. S. (2018). Paradigma Pendidikan Pembebasan Paulo Freire Dalam Konteks Pendidikan Agama Islam. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 1(01), 1–16. <https://doi.org/10.37542/iq.v1i01.3>
- Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 13–28. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13357>